

REFORMASI BIROKRASI MENUJU PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN**Cintya Diva, Rahayu, Siti Tiara Maulia**

Universitas Jambi

cintyadivaaa@gmail.com, ayuhrahayu1@gmail.com, sititiaramaulia@unja.ac.id.**Abstract.**

In the course of a country's development, the importance of bureaucratic reform is undeniable Indonesia has taken various steps to improve its bureaucracy. The research method used is literature research or study literature, which contains theories related to the problems in this study. And the formulation of the problem raised in this study is to find out "Bureaucratic Reform Towards Effective and Efficient Government". Where the theory used in this section will be reviewed with existing literature, especially articles and scientific journals. Bureaucratic reform is a basic management effort that is expected to produce positive changes in systems and structures. Bureaucratic reform aims to improve bureaucratic performance to be more effective and efficient, as well as the creation of a bureaucracy that is professional, neutral, open, democratic, independent, and has integrity and competence in carrying out its duties and responsibilities as public servants and state servants. Clean Government then improves the quality of service to the community and is free of KKN. There are efforts to improve the quality of governance through various means, such as decentralizing power, reforming governance, changing the orientation of the bureaucracy, and increasing public participation to increase accountability, legitimacy, and transparency, but the impact of increasing governance cannot be ignored. Efficiency and effectiveness are hallmarks of good governance, reflecting the government's ability to achieve goals efficiently and effectively. Bureaucratic reform is an effort to improve government performance to be more effective and efficient. By carrying out bureaucratic reforms, the government can reduce excessive bureaucracy, increase transparency and accountability, and improve public services. The main goal of bureaucratic reform is to create a government that is responsive, fast, and able to provide quality services to the people. By carrying out comprehensive and sustainable bureaucratic reforms, it is hoped that the government can achieve effective and efficient governance, which is able to provide maximum benefits to the community and support sustainable development.

Abstrak.

Dalam perjalanan pembangunan suatu negara, pentingnya reformasi birokrasi tak terbantah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki birokrasinya. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan atau study literature, yang berisikan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dan adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui " Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Efektif dan Efisien". Dimana teori yang digunakan pada bagian ini yang akan ditinjau dengan literature yang ada terutama artikel dan jurnal ilmiah. Reformasi birokrasi adalah sebuah usaha manajemen dasar yang diharapkan mampu menghasilkan perubahan yang positif pada sistem dan struktur. Reformasi birokrasi bertujuan untuk memperbaiki kinerja birokrasi agar lebih efektif dan efisien, serta terciptanya birokrasi yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri, serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara. Pemerintah yang bersih (Clean Government) lalu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan bebas KKN. Ada upaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan melalui berbagai cara, seperti mendesentralisasi kekuasaan, mereformasi tata pemerintahan, mengubah orientasi

birokrasi, dan meningkatkan partisipasi publik untuk meningkatkan akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi, namun dampak dari tata kelola yang semakin meningkat tidak bisa diabaikan. Efisiensi dan efektivitas adalah ciri tata pemerintahan yang baik, yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan agar lebih efektif dan efisien. Dengan melakukan reformasi birokrasi, pemerintah dapat mengurangi birokrasi yang berlebihan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperbaiki pelayanan publik. Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, cepat, dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, diharapkan pemerintah dapat mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien, yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Tantangan Reformasi Birokrasi, Pemerintahan Efektif dan Efisien

Pendahuluan

Dalam perjalanan pembangunan suatu negara, pentingnya reformasi birokrasi tak terbantahkan. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan populasi yang besar dan beragam, telah menghadapi tantangan yang kompleks dalam upaya meningkatkan kinerja birokrasi menuju pemerintahan yang efektif dan efisien. Studi kasus mengenai reformasi birokrasi di Indonesia menjadi relevan sebagai cerminan dari upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan birokrasi, mulai dari ketidakmampuan merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat, hingga tingkat korupsi dan birokrasi yang lamban serta tidak efisien. Sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki birokrasinya. Dari penghapusan jabatan struktural yang tidak efektif hingga implementasi sistem merit dalam rekrutmen pegawai negeri, langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Namun, meskipun telah ada kemajuan yang signifikan, tantangan dalam reformasi birokrasi tetap menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Reformasi adalah proses penyempurnaan, perbaikan, pengubahan, dan perombakan birokrasi dari keadaan kurang baik menjadi lebih baik. Birokrasi adalah perangkat/institusi, pegawai/SDM dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai negeri berdasarkan peraturan perundangundangan. Menurut Weber, birokrasi merupakan tipe ideal, oleh karena itu dalam bentuk yang murni, birokrasi tidak terwujud dalam masyarakat (Rohman, 2019:9).

Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif yang ditujukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), termasuk tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance), dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Selain itu reformasi birokrasi juga merupakan suatu upaya yang sangat penting dalam menjaga kinerja pemerintahan agar lebih efektif dan efisien. Di Indonesia, reformasi birokrasi telah menjadi topik utama dalam agenda pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan sumber daya. Birokrasi adalah perangkat/institusi, pegawai/SDM dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai negeri berdasarkan peraturan perundangundangan.

Reformasi birokrasi diarahkan pada proses transformasi mindset dan culture set pada tatanan birokrasi yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Salah satu hambatan yang masih dialami dalam perkembangan reformasi birokrasi seperti masih takutnya pemerintah dalam mengambil dan menanggung resiko yang nantinya merupakan dampak atau konsekuensi atas reformasi birokrasi itu sendiri. Reformasi birokrasi sesungguhnya memang sesuatu yang cukup sensitif dan beresiko karena menyangkut masalah kebiasaan, aparatur dan sistem kerja dalam pelayanan. Dalam konteks ini, studi kasus Indonesia menjadi sangat relevan karena negara ini telah mengalami berbagai perubahan signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas birokrasi. Reformasi birokrasi bukanlah sekadar perubahan struktur dan reposisi birokrasi, lebih dari itu reformasi birokrasi harus meliputi perubahan sistem politik dan hukum secara menyeluruh, perubahan sikap mental dan budaya birokrat dan masyarakat, serta perubahan mindset dan komitmen pemerintah serta partai politik. Harus terdapat kejelasan batas antara pejabat karir dan pejabat politik baik birokrasi pusat maupun daerah. Hal ini juga dimaksudkan untuk membatasi pejabat politik dalam birokrasi. Sebagaimana diterapkan di negara-negara maju, maka pejabat politik hanya dimungkinkan jika dipilih secara langsung rakyat atau mendapatkan persetujuan dari pejabat yang dipilih oleh rakyat.

Dalam artikel ini, kita akan menyelidiki langkah-langkah konkrit yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memperbaiki birokrasinya, menganalisis tantangan-tantangan yang masih dihadapi, dan mengevaluasi dampak dari reformasi birokrasi tersebut terhadap efektivitas dan efisiensi pemerintahan secara keseluruhan.

Metode

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan atau study literature, yang berisikan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dan adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui " Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Efektif dan Efisien". Dimana teori yang digunakan pada bagian ini yang akan ditinjau dengan literature yang ada terutama artikel dan jurnal ilmiah. referensi utama yang digunakan adalah buku, jurnal ilmiah edisi cetak maupun edisi online, hasil penelitian dan artikel ilmiah yang bersumber dari internet. Adapun Sumber data dan sumber informasi yang didapatkan yaitu dari berbagai literatur lalu disusun berdasarkan hasil studi dari informasi yang telah diperoleh. Penulisan ini diupayakan agar saling berkaitan antar satu sama lain dan sesuai dengan topik yang dikaji. Data yang terkumpul diseleksi dan diurutkan sesuai dengan topik kajian kemudian dilakukan penyusunan, dengan menggunakan metode penelitian ini, penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang akan diteliti.

Pembahasan

Reformasi merupakan upaya atau proses perubahan atau perbaikan yang dilakukan dalam suatu sistem, kebijakan, atau struktur yang dianggap tidak efektif, tidak efisien, atau tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Reformasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas suatu sistem atau lembaga agar dapat lebih baik dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Reformasi dapat melibatkan perubahan dalam kebijakan, regulasi, prosedur, struktur organisasi, dan budaya kerja untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan. Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk di dalamnya Masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah

kemajuan. Dalam pengertian ini perubahan masyarakat diarahkan pada development (Susanto, 180).

Birokrasi merupakan instrumen dalam masyarakat yang kehadirannya diperlukan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis bahwa negara mempunyai misi untuk mensejahterakan masyarakat. Karena birokrasi dianggap masih belum efisien, dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi masih tidak jelas, tetapi masih ditangani pemerintah, karena itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyat. Negara secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat yang disebut dengan istilah birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat. Ruang lingkup reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Hal ini berhubungan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan wewenang dan kekuasaan. Reformasi birokrasi adalah sebuah usaha manajemen dasar yang diharapkan mampu menghasilkan perubahan yang positif pada sistem dan struktur (Kristian, 2022). Reformasi birokrasi merujuk pada serangkaian upaya atau langkah yang dilakukan untuk melakukan perubahan dalam sistem birokrasi suatu negara. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kinerja birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih efektif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Reformasi birokrasi biasanya melibatkan restrukturisasi organisasi, penyederhanaan prosedur, pemberdayaan pegawai, penggunaan teknologi informasi, dan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan. Dengan melakukan reformasi birokrasi, diharapkan birokrasi dapat menjadi lebih efisien, profesional, dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat. Ruang lingkup reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Hal ini berhubungan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan wewenang dan kekuasaan. Reformasi birokrasi adalah sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Maka dari itu masyarakat perlu mengetahui reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini agar kehidupan bernegara berjalan dengan baik, masyarakat juga berposisi sebagai penilai dan pihak yang dilayani pemerintah. Reformasi birokrasi bertujuan untuk memperbaiki kinerja birokrasi agar lebih efektif dan efisien, serta terciptanya birokrasi yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri, serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara. Pemerintah yang bersih (Clean Government) lalu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan bebas KKN.

Reformasi birokrasi memiliki dampak yang signifikan terhadap pemerintahan secara keseluruhan, antara lain: 1) Efisiensi dan Efektivitas: Reformasi birokrasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dengan mengurangi birokrasi yang berlebihan, menyederhanakan prosedur, dan meningkatkan kinerja pegawai. 2) Transparansi dan Akuntabilitas: Melalui reformasi birokrasi, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. 3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Reformasi birokrasi berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan

mempercepat proses, meningkatkan responsivitas, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada Masyarakat. 4) Pemberdayaan Pegawai: reformasi birokrasi dapat memberdayakan pegawai dengan peningkatan kompetensi, motivasi, dan keterampilan, sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan. 5) Inovasi dan Pengembangan: Dengan reformasi birokrasi, pemerintah mendorong inovasi dan pengembangan dalam berbagai aspek pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas terhadap perubahan. 6) Peningkatan Kepatuhan Hukum: Reformasi birokrasi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. 7) Peningkatan Kredibilitas dan Legitimasi: Melalui reformasi birokrasi yang berhasil, pemerintah dapat meningkatkan kredibilitas, legitimasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Salah satu tantangan reformasi birokrasi yang kedua adalah campur tangan politik yang tinggi di dalamnya. Intervensi politik dalam birokrasi sering terjadi saat sekelompok elit partai politik memanfaatkan momen pemilihan umum untuk memobilisasi birokrasi dan menjadikannya sebagai mesin politik para aktivis politik. Hal ini mengakibatkan birokrasi kehilangan fokus dan gagal dalam memenuhi tugasnya dalam melayani masyarakat. Gangguan konsentrasi birokrasi juga menyebabkan terjadinya rotasi kepala daerah setiap lima tahun. Para pemimpin yang bergantung pada kandidat petahana yang dominan seringkali merasa kesulitan dalam bersaing jika kalah dalam pemilihan berikutnya. Selain itu, politisasi birokrasi untuk membangun hubungan antara eksekutif dan legislatif juga mengalami ketegangan dinamis yang serius jika tidak dijaga dengan konsisten. Akibatnya, sebagian besar birokrasi yang menempuh jalan kompromi pada akhirnya turut memperkaya tingkat kebocoran akibat melakukan konspirasi kolektif. Indikasinya dapat dilihat melalui meningkatnya kebocoran perencanaan anggaran saat ini dan anggaran pada saat pembentukannya. Jarak birokrasi secara eksplisit dengan kelompok politik mengalami ketegangan karena rentan kehilangan posisi.

Dalam reformasi birokrasi, faktor kedua yang menjadi tantangan adalah intervensi politik yang tinggi di dalam birokrasi. Beberapa kelompok elit politik memanfaatkan momentum pemilu untuk memanipulasi birokrasi sebagai mesin politik mereka. Hal ini menyebabkan gangguan konsentrasi birokrasi, dan mereka gagal memenuhi misi mereka untuk melayani masyarakat. Konsentrasi birokrasi pecah dan kepala daerah seringkali berganti setiap lima tahun. Selain itu, banyak birokrat yang bersikap apatis terhadap dinamika pergantian pemerintahan. Intervensi politik merangsang keinginan untuk membangun komitmen rahasia dengan elit selama sirkulasi kekuasaan. Komitmen tersebut berupa kesepakatan politik yang berujung pada pertanyaan siapa dapat menjadi apa, berapa banyak dan kapan. Dalam situasi ini, koalisi antara eksekutif dan legislatif terbentuk, yang akhirnya menyebabkan pembobolan anggaran.

Tantangan reformasi birokrasi yang ketiga adalah keraguan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dihasilkan oleh birokrasi. Salah satu faktornya adalah kurangnya pendidikan dan analisis yang memadai dalam merancang kebijakan, sehingga kebijakan tersebut tidak efektif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Tingginya resistensi yang ditunjukkan oleh masyarakat dan sektor swasta yang merasa dirugikan oleh kebijakan birokrasi juga memperkuat keraguan tersebut. Selain itu, rendahnya kredibilitas birokrasi dalam merancang kebijakan juga menjadi faktor penyebab keraguan tersebut. Hal ini tampak dari minimnya keterlibatan para ahli, minimnya naskah akademik tentang rancangan peraturan, dan kurangnya konsultasi publik mengenai rancangan peraturan yang dibuat. Semua ini menyebabkan kualitas rancangan kebijakan menjadi buruk, dan akhirnya ditolak oleh

pemangku kepentingan. Walaupun demikian, birokrasi cenderung menutupi kelemahan kebijakan tersebut, dan bersikap arogan dalam menanggapi tuntutan masyarakat, karena merasa eksklusif dan mengetahui segala hal. Selain itu juga terdapat faktor lain yang menjadi tantangan dalam reformasi birokrasi.

Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan melalui berbagai cara, seperti mendesentralisasi kekuasaan, mereformasi tata pemerintahan, mengubah orientasi birokrasi, dan meningkatkan partisipasi publik untuk meningkatkan akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi, namun dampak dari tata kelola yang semakin meningkat tidak bisa diabaikan. Di negara-negara berkembang, kebijakan-kebijakan seperti itu sebenarnya semakin memperkuat demokrasi liberal, tetapi pada akhirnya juga bisa memicu peningkatan kontrol pemerintah yang represif. Namun, sebagian besar masyarakat masih meyakini bahwa pemerintahan yang kuat sangat penting bagi stabilitas politik dan keberhasilan pembangunan. Akhirnya birokrasi terkadang kembali menjadi masalah klasik tanpa jalan keluar yang jelas (Suyatno, 2016).

Gerakan reformasi yang digulirkan dari berbagai kekuatan dalam masyarakat, yang dilakukan oleh mahasiswa pada tahun 1998, bertujuan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang sedang terpuruk akibat dari krisis ekonomi. Gerakan reformasi diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap berbagai penyelesaian bangsa selama masa pemerintahan Orde Baru, seperti kasus korupsi, nepotisme dan kolusi. Beberapa kasus terkait penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan menjadi salah satu faktor terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Masyarakat menghendaki terjadinya reformasi, akan diikuti dengan perubahan mendasar pada desain kehidupan masyarakat, terkait dimensi politik, sosial, ekonomi dan budaya. Perubahan struktur, budaya dan paradigma birokrasi dalam berhadapan dengan masyarakat menjadi suatu hal penting untuk dilakukan, karena birokrasi mempunyai kontribusi terhadap krisis multi dimensi yang terjadi di Indonesia.

Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraannya di arahkan untuk menciptakan kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel. Pelaksanaan reformasi birokrasi telah mendapatkan landasan hukum melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Salah satu agenda Indonesia pada reformasi birokrasi adalah menciptakan Good Governance di Indonesia. Pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur (Yusriadi, 2018b). Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik. Diharapkan dengan adanya pembaruan dalam ketatalaksanaan, sumber daya.

Pemerintah telah mengambil beberapa langkah konkret dalam upaya memperbaiki birokrasi di Indonesia, antara lain: 1) Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses birokrasi untuk mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. 2) Menyederhanakan prosedur administrasi dan pengurangan birokrasi yang berlebihan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik. 3) Melakukan reformasi struktural dalam sistem birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas lembaga pemerintah. 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. 5) Memperkenalkan teknologi informasi

dan sistem digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses administrasi.

Efisiensi dan efektivitas adalah ciri tata pemerintahan yang baik, yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Mencapai tujuan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dapat mendorong peningkatan kualitas produktivitas tanpa membuang banyak sumber daya. Kegagalan dalam mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan membuat pemerintah tidak dapat membuat kebijakan strategis, dan juga mengalami beban anggaran yang besar (Maranjaya, 2022).

Belakangan ini, memang reformasi birokrasi dirasakan tidak semudah membalikkan telapak tangan tanpa kerja keras semua komponen bangsa termasuk para birokrat itu sendiri. Reformasi birokrasi bukan hanya sekadar permasalahan peningkatan pendapatan atau remunerasi birokrat semata, namun lebih jauh dari itu yaitu perubahan sikap mental dari yang dilayani menjadi pelayan profesional sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Kasus Gayus menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi belum menyentuh kepada perubahan sikap mental dan pilar-pilar dalam reformasi birokrasi itu sendiri. Namun, perlu disadari bahwa reformasi birokrasi merupakan sebuah proses dan bukanlah sebuah tujuan akhir. Seperti halnya kesuksesan bukan merupakan tujuan, melainkan sebuah perjalanan. Perjalanan itupun memerlukan waktu dan tidak langsung jadi melainkan butuh kekonsistensian

Belajar dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di beberapa negara, Indonesia terus berusaha melakukan perbaikan. Salah satu usaha pembaharuan untuk menunjang reformasi birokrasi adalah menggunakan information technology. Usaha ini dinilai efektif untuk memperbaiki birokrasi di Indonesia. Information technology dapat diterapkan di lembaga negara seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan pejabat administrasi publik pun dapat menggunakan teknologi dalam menyampaikan berbagai informasi mengenai pemerintahan kepada masyarakat. Dengan information technology kerja pemerintahan dinilai dapat lebih efisien. Masyarakat juga dapat mengontrol langsung kinerja pada pejabat publik, ini tentunya akan membawa pengaruh yang baik dalam birokrasi di Indonesia (Yusriadi, 2018b).

Kesimpulan

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan agar lebih efektif dan efisien. Dengan melakukan reformasi birokrasi, pemerintah dapat mengurangi birokrasi yang berlebihan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperbaiki pelayanan publik. Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, cepat, dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, diharapkan pemerintah dapat mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien, yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kunci keberhasilan reformasi birokrasi tersebut pada kesediaan pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam hal peningkatan kualitas birokrasi dan terlibat dalam mekanisme pengawasan eksternal setiap jenjang pemerintahan. Terlebih warga negara dalam hal ini masyarakat yang secara langsung bisa merasakan bagaimana efek perubahan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai tujuan akhir dari reformasi birokrasi menuju Good Governance yang menjadi harapan seluruh bangsa Indonesia.

Referensi:

- Akbar, G. G., Rulandari, N., & Widaningsih, W. (2021). Reformasi Birokrasi Di Indonesia, Sebuah Tinjauan Literatur. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 187–199. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1981>
- Damanhuri, D., & Jawandi, R. (2017). Reaktualisasi reformasi birokrasi menuju good governance. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017*, 2(6), 297–304.
- Daraba, D. (2019). Reformasi birokrasi & pelayanan publik.
- Idris, A. (2017). Bingkai reformasi birokrasi indonesia. *Jurnal Paradigma (Jp)*, 2(3), 352–357.
- Kairupan, J. (2015). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 4(35), 1468.
- Kusuma, T. P., Setyadi, D. S., Andaru, I. W., & Roziqin, A. (2022). Reformasi Birokrasi Dalam Aspek Efisiensi Dan Transparansi Pada Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Kota Batu. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 1-9.
- Kuswandi, A., Ramadhina, K. A., & Nuraini, S. (2022). Analisis Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Di Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 2(1), 98–114. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/view/2459>
- Kuzaimah Kuzaimah, Rini Werdiningsih, & Bambang Windu Sancono. (2023). Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 6(1), 01–23. <https://doi.org/10.56444/jma.v6i1.477>
- Meiwanda, G. (2017). Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru, Bersih dan Bermartabat. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 331-336.
- Radiansyah, R. R. (2020). Reformasi birokrasi sebagai upaya mewujudkan good governance melalui kerangka otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 80–93.
- Rivai, V. (2020). Reformasi Birokrasi Pemerintah Perwujudan Good Governance Melalui Pemerintahan Yang Efisien, Efektif dan Produktif. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 10(4), 17-33.
- Rohayatin, T. (2017). Strategi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah: Menuju Era Globalisasi. *Jurnal Transformative*, 40–52. <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/viewFile/22/23>
- Setyasih, E. T. (2023). Reformasi Birokrasi Dan Tantangan Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 48–62.
- Yunandi, A. M. (2021). Teori Birokrasi Max Weber. [Http://Eprints.Pknstan.Ac.Id/](http://Eprints.Pknstan.Ac.Id/), 1–25.
- Yusriadi, Y. (2018). Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 8(2), 178. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824>